

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KEBIJAKAN KOREA SELATAN ATAS PENUTUPAN AKTIVITAS DI INDUSTRI KAESONG

Penutupan Kaesong pada tahun 2016 merupakan sebuah berita yang mengejutkan bagi berbagai pihak. Mengingat kaesong merupakan keberhasilan upaya Korea Selatan dalam membuka kerjasama dengan Korea Utara.

Dalam bab ini, penulis mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara. Penulis akan menjelaskan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh Korea Selatan terhadap tindakan provokatif Korea Utara pada tahun 2016 dibawah pemerintahan Park Geun Hye.

A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Kebijakan Politik Luar Negeri Korea Selatan Untuk Menutup Kawasan Industri Kaesong

Politik Luar Negeri negara didasari pada adanya situasi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer negara, dan konteks internasional. Faktor-faktor tersebut ada dalam kebijakan politik luar negeri Korea Selatan dalam mengambil kebijakannya terhadap Korea Utara.

1. Situasi Politik Dalam Negeri

Kondisi politik dalam negeri meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Keadaan politik dalam negeri Korea Selatan dilihat dari bagaimana respon masyarakat Korea

Selatan terhadap situasi atau keadaan yang ada. Kebijakan Korea Selatan untuk menutup kawasan Kaesong muncul dari adanya keresahan masyarakat Korea Selatan yang merasa adanya ancaman keamanan dari Korea Utara. Respon lain muncul dari masyarakat Korea Selatan atas uji coba missil Korea Utara. Dengan adanya peluncuran missil untuk ketiga kalinya, masyarakat Korea Selatan merasa perlu untuk negaranya membuat kebijakan yang lebih tegas akan tindakan Korea Utara.

Masyarakat Korea Selatan merasa perlu adanya kebijakan yang tegas untuk menanggulangi peristiwa tersebut. Mengingat tindakan provokatif yang selalu dilakukan oleh Korea Utara selalu terjadi. Dengan adanya uji coba nuklir pada tahun 2016 ini masyarakat membuat respon dengan menuntut pemerintah Korea Selatan untuk membuat tindakan sanksi yang tegas. Masyarakat menginginkan negaranya yang bebas dari ancaman keamanan nuklir, dan menginginkan negaranya untuk bersikap tegas atas tindakan provokatif yang mengancam dan membahayakan.

Respon yang diberikan oleh warga Korea Selatan dengan menyampaikan aspirasi dengan mengadakan demo. Dengan tindakan Korea yang mengancam keamanan ini, sekitar 150 orang berkumpul di pusat kota Seoul pada 7 Januari 2016 untuk memprotes uji coba bom hidrogen yang dilakukan oleh Korea Utara. Mereka membakar patung pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan merobek bendera Korea Utara. Aksi Protes ini sendiri dilakukan juga sebagai bentuk warga

Korsel dalam menuntut pemerintah Korea Selatan untuk mengambil langkah lebih tegas terhadap Korea Utara.¹

2. Ekonomi Korea Selatan

Setelah peluncuran rudal Korea Utara gagal pada Januari 2016, ketegangan meningkat di tengah kekhawatiran bahwa negara yang terisolasi ini akan segera menguji bom nuklir lain atau rudal. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menyatakan khawatir bahwa provokasi Korea Utara baru-baru ini mungkin akan semakin menekan lebih lanjut dari perekonomian Korea Selatan yang masih berjuang untuk bangkit.² Tindakan peluncuran nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara memang membuat kondisi dan situasi di semenanjung Korea menjadi suatu kekhawatiran banyak negara. Provokasi yang dilakukan utara memperlihatkan bagaimana Pyongyang masih terus mengembangkan nuklirnya, sehingga hal ini menjadi ancaman bagi para investor maupun pebisnis yang bekerjasama dengan Korea Selatan.

Berdasarkan PDB (Pendapatan Domestik Bruto), ekonomi Korea Selatan sendiri berada di peringkat ke 15 dunia. Adapun sistem ekonomi yang dianut Korea Selatan adalah sistem ekonomi pasar. Menurut data bahwa sampai dengan 2014, jumlah total populasi Korea Selatan berada

¹ [bbc.com/indonesia](http://www.bbc.com/indonesia), “Protes Warga Korea Selatan terhadap Bom Korea Utara” diakses pada 10 Desember 2016. Melalui laman http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160107_dunia_korsel_korut

² [centuryrealtime.com](http://www.centuryrealtime.com), “Ketegangan Geopolitik Menekan Perekonomian Korea Selatan” diakses pada 5 Mei 2017. Melalui laman <http://www.centuryrealtime.com/berita-analisis/komoditi/22-news/vibeconomibusiness/17373-Ketegangan%20Geopolitik%20Menekan%20Perekonomian%20Korea%20Selatan>

di angka 50.4 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di 2014 tercatat dikisaran 3.3%, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 2.9%. Selain itu, Korea Selatan mencatatkan pendapatan per kapita sebesar US\$ 34,356.³

Tingginya pendapatan per kapita Korea Selatan menempatkan Korea Selatan kedalam salah satu negara maju di dunia. Salah satu penopang utama perekonomian Korea Selatan adalah munculnya industri-industri besar selepas perang dunia kedua. Industri-industri ini membentuk konglomerasi atau yang lebih dikenal dengan nama *Chaebol*. Kekuatan utama dari industri-industri ini adalah pada kemampuannya mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang produksi.⁴

Namun memasuki awal tahun 2016, ekonomi Korea Selatan mengalami kesulitan. Dengan adanya kondisi eksternal membuat perkembangan ekonomi Korea Selatan lebih sulit dari yang diperkirakan dikarenakan adanya peningkatan ketegangan yang terjadi di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Selatan menunjukkan penurunan ekspor negaranya bulan lalu dan penurunan dua digit dalam ekspor Januari Tiongkok, mitra dagang terbesar Korea Selatan, sebagai faktor mengkhawatirkan. Ekspor Korea Selatan anjlok 18,5% bulan lalu, membukukan penurunan bulanan tercepat dalam lebih dari enam tahun. Ekspor yang mencapai sekitar setengah dari perekonomian, diperkirakan

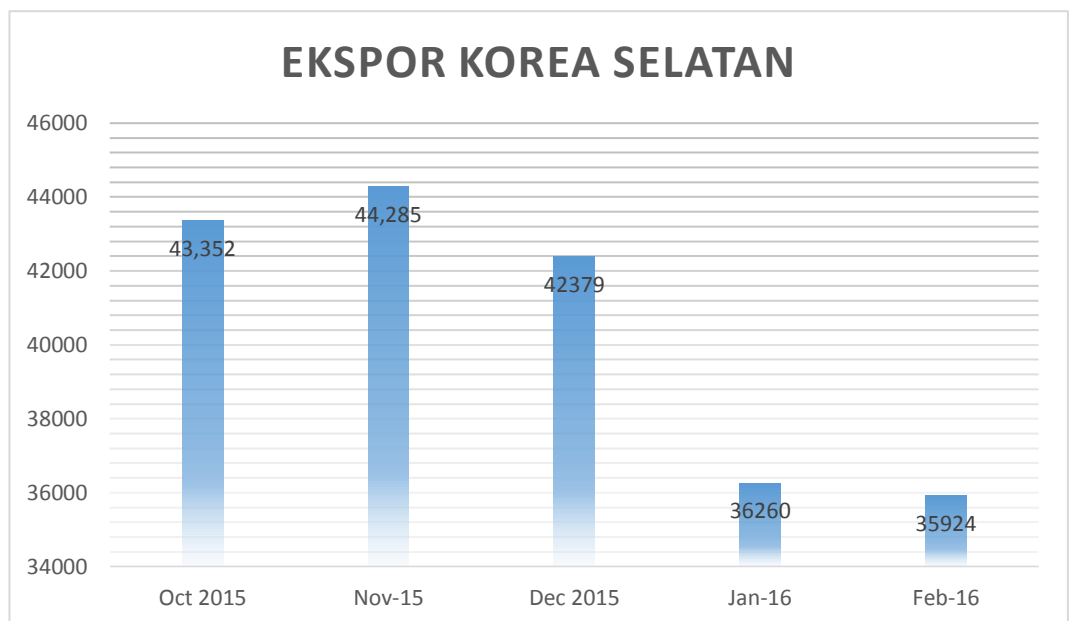
³ id.tradingeconomics.com, "Trading Economic" diakses pada 5 Mei 2017. Melalui laman <http://id.tradingeconomics.com/south-korea/gdp-per-capita-ppp>

⁴ *Ibid*

telah mencatat penurunan dua digit pada bulan Februari berdasarkan data selama 20 hari pada bulan pertama.⁵

Penurunan ekspor Korea Selatan dapat dilihat dari diagram dibawah ini :

Grafik 4. 1 Grafik Ekspor Korea Selatan



Sumber : id.tradingeconomics.com, “Korea Selatan-Harga Ekspor” dalam laman <http://id.tradingeconomics.com/south-korea/export-prices>

Ketegangan meningkat di semenanjung Korea setelah uji bom hidrogen pertama Korea Utara pada 6 Januari, diikuti oleh peluncuran pada 7 Februari dari roket jarak jauh, yang mana hal ini merupakan sebuah ancaman bagi dunia internasional mengingat roket yang di luncurkan oleh Utara merupakan sebuah jenis roket missil yang dilarang karena dapat membahayakan negara lain.

⁵ centuryrealtime.com, “Ketegangan Geopolitik Menekan Perekonomian Korea Selatan” diakses pada 5 Mei 2017. Melalui laman <http://www.centuryrealtime.com/beritaanalisis/komoditi/22news/vibeconomibusiness/17373Ketegangan%20Geopoltik%20Menekan%20Perekonomian%20Korea%20Selatan>

Dengan adanya penurunan ekonomi Korea Selatan karena adanya ancaman yang terjadi di semenanjung Korea membuat kekhawatiran meningkat bahwa kenaikan risiko geopolitik di semenanjung bisa menekan lebih lanjut dari perekonomian Korea Selatan, pembuat kebijakan atas ekonomi negara itu mengatakan bahwa akan melakukan upaya terbaik untuk meminimalkan kemungkinan dampak ekonomi yang negatif. Yoo Il-Ho, wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi yang merangkap sebagai menteri keuangan, mengatakan kepada wartawan asing di Seoul bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk meminimalkan dampak dari Korea Utara (DPRK) dan sementara terus memantau perkembangan geopolitik.⁶

Dengan ancaman ini, Korea Selatan menyatakan rencana pada tanggal 10 Februari untuk menghentikan operasi pabrik bersama dengan Korea Utara yang ada pada industri Kaesong sebagai bentuk kebijakan tegas atas adanya tindakan yang membawa dampak negatif terhadap ekonomi Korea Selatan.

3. Keadaan Militer Korea Selatan

Korea Selatan memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan negaranya. Keamanan sendiri tidak lepas dari bagaimana kekuatan militer suatu negara tersebut. Dengan meningkatnya ketegangan di

⁶ centuryrealtime.com, “Ketegangan Geopolitik Menekan Perekonomian Korea Selatan” diakses pada 5 Mei 2017. Melalui laman <http://www.centuryrealtime.com/beritaanalisis/komoditi/22news/vibeconomibusiness/17373Ketegangan%20Geopolitik%20Menekan%20Perekonomian%20Korea%20Selatan>

semenanjung Korea, Korea Selatan harus mempersiapkan militernya untuk keadaan tertentu yang bisa mengancam negaranya.

Persiapan militer Korea Selatan dimulai dari adanya keputusan Park Geun-Hye untuk memanggil sejumlah pejabat senior dalam sebuah rapat yang di gunakan untuk membahas dan meninjau strategi pertahanan yang akan dilakukan dalam menghadapi ancaman nuklir dari Korea Utara.

Strategi Korea Selatan dalam menghadapi ancaman yang ada tidak terlepas dari adanya peran Amerika Serikat didalamnya. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kunjungan perwakilan AS ke Seoul untuk bertemu dengan Menteri pertahanan Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut, AS dan Korsel sepakat untuk memperkuat pertahanan bersama untuk menanggapi ancaman nuklir dan misil [Korea Utara](#) yang semakin meningkat.⁷

AS sendiri tetap berkomitmen membela Korea Selatan dan membantu langkah pencegahan dengan memanfaatkan kemampuan militer AS. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan dalam pernyataan tertulis, kedua negara sepakat untuk mengerahkan sistem pertahanan rudal Terminal Pertahanan Wilayah Ketinggian Udara atau *Terminal High Altitude Area Defence* (THAAD) di Korea Selatan seperti yang telah direncanakan untuk menandingi kemampuan nuklir dan rudal

⁷ [voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com), "AS-Korea Selatan Perkuat Kerjasama Pertahanan Hadapi Korea Utara" diakses pada 5 Mei 2017. Melalui laman <http://www.voaindonesia.com/a/as-korea-selatan-perkuat-kerjasama-pertahanan-hadapi-korea-utara/3032624.html>.

Korea Utara.⁸ Selain sistem THAAD yang akan di operasikan di Korea Selatan, AS dan Korea Selatan juga sepakat untuk melakukan latihan gabungan militer terbesar dari tahu sebelumnya dengan melibatkan 300 ribu personel militer Korea Selatan dan 17.000 personel militer AS.⁹ Latihan gabungan antara AS dan Korsel ini dilakukan untuk melatih anggota militer Korsel agar memiliki kemampuan militer yg lebih untuk menghadapi Korea Utara dan memperbaiki kemampuan komando militer serta kapasitas intelijennya.¹⁰

4. Pelanggaran Korea Utara atas Sanksi PBB

Dalam lingkup keamanan global, sejak awal abad 21 dengan adanya kemajuan yang pesat dalam inovasi teknologi negara-negara di dunia mulai saling membuka dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa saling memberikan kepercayaan dan keuntungan bagi negaranya. Meskipun pada saat yang bersamaan, sejalan dengan perkembangan kerjasama negara tersebut akan muncul resiko-resiko yang juga ikut berkembang dan bahkan akan membawa dampak kerusuhan hingga ancaman keamanan. Masalah keamanan yang sering kali muncul membuat beberapa pihak merasa perlu memperkuat militernya untuk berjaga-jaga dari adanya serangan dan ancaman dari negara lain. Beberapa negara aliansi bahkan melakukan gabungan

⁸ [cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), “AS-Korea Selatan Perkuat Kerja Sama Pertahanan” diakses pada 6 Mei 2017. Melalui laman <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20170131111603-113-190230/as-korea-selatan-perkuat-kerja-sama-pertahanan/>

⁹ [voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com), “Korea Utara Kembali Ancam Serangan Nuklir Terhadap Korea Selatan, AS” diakses pada 5 Mei 2017. Melalui laman <http://www.voaindonesia.com/a/korea-utara-kembali-ancam-serangan-nuklir-terhadap-korea-selatan-as/3222619.html>

¹⁰ *Ibid.*

militer demi memperkuat militernya. Militer Korea Utara merupakan militer yang jauh berbeda peralatannya dengan negara lain, karena diyakini bahwa kemampuan militer dan kesiapan operasional militer Utara berasal dari peralatan yang telah dalam kondisi usang.

Pengembangan nuklir tersebut selalu di sertai dengan adanya peluncuran rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara. Pada tahun 2009, 2013, 2014, hingga maret 2015 Korea Utara selalu melakukan uji coba senjata atau rudal balistik yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke negara Jepang. PBB dan negara-negara lainnya sudah mengecam aksi Korea Utara tersebut, dengan memberikan sanksi-sanksi terhadap Korea Utara. Namun, hal ini tidak membuat Korea Utara menghentikan tindakanya. Hampir setiap tahun Korea Utara selalu melakukan tindakan provokatif di wilayah Asia Timur. Tindakan uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara sejak pada masa jabatan Par Geun Hye diawal 2013 hingga Februari 2016 akan dilampirkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Tindakan Provokatif Uji Coba Nuklir Korea Utara

No	Tanggal	Keterangan
1	Februari 2013	Korea Utara melaksanakan uji-coba nuklir ke-3
2	Maret 2013	Dua rudal tipe KN diluncurkan ke perairan Laut Timur
3	April 2013	Korea Utara menyatakan akan kembali mengoperasikan reaktor nuklir berkapasitas 5MW di Yongbyeon
4	Mei 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Satu artileri 300 mm ditembakkan ke perairan Laut Timur - Sebanyak 6 artileri 300 mm ditembakkan ke perairan Laut Timur
5	Februari 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Dua rudal Scud diluncurkan ke perairan Laut Timur - Penembakan 4 artileri 300 mm ke perairan Laut Timur
6	Maret 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Sebanyak 4 artileri 300 mm dan 3 artileri 240 mm ditembakkan ke perairan Laut Timur
8	Juni 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Tiga artileri 300 mm ditembakkan ke perairan Laut Timur
9	Juli 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Empat artileri 300 mm ditembakkan ke perairan Laut Timur - Penembakan seratus artileri 240 mm, 122 mm dan peluru artileri ke perairan Laut Timur
10	Agustus 2014	Penembakan 5 artileri 300 mm ke perairan Laut Timur
12	Februari 2015	Peluncuran 5 rudal jarak pendek tipe baru ke perairan Laut Timur
13	Maret 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Sebanyak 7 rudal darat ke udara tipe SA diluncurkan ke perairan Laut Timur - Dua rudal Scud diluncurkan ke perairan Laut Timur
16	Agustus 2015	Korea Utara melakukan provokasi tembakan ke Yeongcheon, provinsi Gyeonggi, Korea Selatan
17	Januari 2016	Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke-4. Televisi Pemerintah Korea Utara mengklaim uji bom nuklir pertama berjalan secara sukses
18	Februari 2016	Roket jarak jauh Gwangmyeongseong-4 diluncurkan di Tongchang-ri, provinsi Pyongang Utara

Sumber: *World.kbs.co.kr*, "Catatan tentang nuklir dan rudal Korea Utara" diakses pada 25 Maret 2017. Melalui laman http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/history/nucleus_history.htm?lang=i

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama masa jabatan Park Geun Hye, Korea Utara terus melakukan tindakan provokatif yang mengancam keamanan. Selain itu, ancaman yang dilakukan oleh Korea Utara sendiri telah melanggar isi dari resolusi DK PBB yang pada tahun 2013 sudah pernah diberikan untuk Pyongyang. Resolusi yang diberikan PBB terhadap Korea Utara merupakan resolusi 2094, 2013 dan resolusi 2087, 2013. Resolusi yang diberikan kepada Korea Utara merupakan sebuah respon keras atas tindakan yang sama, yaitu uji coba nuklir.¹¹

Resolusi yang diberikan kepada Korea Utara ini mendesak Korea Utara untuk menghentikan ujicoba nuklir berikutnya, melepaskan rencana senjata nuklir dan kembali ke Persetujuan Non-proliferasi Senjata Nuklir. Resolusi itu berkomitmen pula untuk menyelesaikan situasi tegang dewasa ini melalui solusi damai, diplomatis dan politis. Resolusi itu menegaskan kembali akan mendukung dan mengimbuai penghidupan kembali Pembicaraan 6 Pihak. Resolusi kedua kembali dikeluarkan oleh PBB untuk meminta Korea Utara mematuhi resolusi sebelumnya dan menanggalkan semua senjata nuklir serta program nuklirnya. Juga tidak boleh tidak ada uji coba lebih lanjut yang menggunakan teknologi rudal balistik, uji coba nuklir, atau provokasi lebih lanjut.

¹¹ indonesia.embassy.gov.au, “Uji Coba Nuklir Korea Utara” diakses pada 5 Mei 2017. Diakses pada laman http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM16_002.html

Resolusi DK PBB didukung oleh negara-negara lain yang menginginkan Korea Utara untuk melepaskan semua rencana tentang riset dan pembuatan senjata nuklir serta sistem rudal militer, dan dapat kembali ke Persetujuan Non-proliferasi Senjata Nuklir dan mekanisme terkait Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), serta bergabung dengan Persetujuan Pencegahan Ujicoba Nuklir Secara Menyeluruh untuk memelihara perdamaian dan kestabilan di Semenanjung dan kawasan Asia Timur Laut sesuai dengan kepentingan bersama masyarakat internasional.¹²

Namun, adanya Resolusi tersebut tidak membuat Korea Utara mengurungkan niatnya untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya tersebut. Respon Korea Utara terhadap resolusi tersebut jauh dari harapan, karena Korea Utara pada kenyataannya masih tetap melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keamanan dan stabilitas di semenanjung Korea yang melanggar adanya Resolusi dari Dewan Keamanan PBB.

B. Faktor Kepentingan Nasional Korea Selatan Untuk Menutup Kawasan Industri Kaesong

Faktor keamanan merupakan bagian dari kepentingan suatu negara yang menjadi alasan untuk mengambil langkah kebijakan negara tersebut. Dalam kasus KIC, Korea Selatan memiliki faktor keamanan yang

¹² indonesian.cri.cn, "PBB Ratifikasi Resolusi Masalah Nuklir Korut" diakses pada 6 Mei 2017. Melalui laman <http://indonesian.cri.cn/201/2013/03/08/1s136265.htm>

membuat negara Korea Selatan harus membuat kebijakan baru untuk melindungi negaranya dari ancaman keamanan yang ada.

1. Faktor Keamanan

Pemerintahan Korea Selatan pada masa Park Geun Hye menetapkan suatu kebijakan baru yang mengacu pada kepercayaan. Kebijakan Park Geun Hye tersebut adalah kebijakan “*Trust-building process*” di Semenanjung Korea yang didukung oleh adanya komitmen yang kuat untuk keamanan, dan dengan memiliki tujuan untuk membangun kepercayaan dalam hubungan antar kedua Korea. Prioritas utama dari adanya “*trustpolitik*” adalah untuk membangun adanya kepercayaan di Semenanjung Korea, dengan memastikan siklus yang baik yang akan meningkatkan hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara, menjaga perdamaian di wilayah tersebut, dan membuat dasar untuk unifikasi Korea.

Trust Building Process di tujukan untuk mengakhiri siklus ketegangan yang sering melanda hubungan di Semenanjung Korea. Banyaknya tindakan provokasi, dan krisis menyebabkan ketidakstabilan dan konfrontasi di Semenanjung Korea. Dan dengan kebijakan *Trust Building Process* memberikan harapan baru bagi semenanjung Korea untuk mengakhiri krisis serta permasalahan yang ada, selain itu kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong Korea Utara untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab dari masyarakat internasional.

Karena tanpa adanya kepercayaan diantara kedua Korea serta diantara Korea Utara dan masyarakat internasional, tidak akan ada sebuah solusi untuk masalah nuklir. Dengan pemikiran ini, pemerintah Korea Selatan telah menetapkan untuk mengatasi akar penyebab pengembangan nuklir Korea Utara dengan membangun sebuah program kepercayaan tanpa meninggalkan bentuk pendekatan dari masa lalu. Upaya ini merupakan cara untuk untuk memaksimalkan kekuatan potensi masing-masing. Menurut data dari Ministry of Reunification *Trust Building Process* memiliki 3 tujuan umum yaitu:

13

1. *Pertama*, kebijakan yang mengupayakan proses membangun sebuah kepercayaan di semenanjung bertujuan untuk mendorong pengembangan hubungan antar-Korea. Point ini menjelaskan bahwa pemerintah Korea Selatan membuka bab baru hubungan antar-Korea berdasarkan akal sehat dan sesuai dengan norma-norma dan standar internasional, sementara pada saat yang sama Semenanjung Korea berusaha untuk memperluas dasar kepentingan bersama melalui kerja sama yang saling memberikan keuntungan. Upaya ini akan mendukung tujuan unifikasi untuk membangun kembali kehidupan bersama antar-Korea dalam hal ekonomi, sosial dan budaya.
2. *Kedua*, proses *trust-building* yang berupaya untuk membangun perdamaian abadi di semenanjung Korea. Perdamaian akan tetap menjadi harapan sulit untuk dicapai selama Korea Utara terus meningkatkan baik persenjataan nuklirnya dan ancaman militer yang dilakukan ke Korea Selatan. Untuk mengamankan adanya

¹³ Ministry Of Reunification, "Unification Policy: Trust-building Process Policy" diakses pada tanggal 28 Maret 2017. Diakses melalui laman <http://eng.unikorea.go.kr/content.do?cmsid=1782>

perdamaian yang abadi, pemerintah Korea Selatan akan bekerja dengan masyarakat internasional untuk perlucutan nuklir serta untuk generasi saling percaya antar-Korea di bidang politik dan militer.

3. *Ketiga*, tujuan kebijakan Korea Selatan adalah untuk meletakkan dasar untuk Unifikasi di dalam dan di luar negeri, dalam rangka memenuhi tujuan akhir dari penyatuan kembali Semenanjung Korea. Untuk tujuan ini, Korea Selatan harus terlibat dalam pembangunan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengambil inisiatif dalam mempersiapkan unifikasi. Pemerintah Korea Selatan akan melakukan upaya untuk meminta dukungan dan kerjasama seluruh dunia untuk tujuan upaya penyatuan Korea, dengan pemahaman bahwa hal ini akan menjadi *win-win solution* tidak hanya untuk kedua bagian semenanjung, tetapi juga untuk masyarakat internasional.

Selain tujuan umum, kebijakan *Trust Building-Process* juga memiliki 4 arah kebijakan untuk program nuklir Korea Utara. Arah kebijakan ini, *Pertama*, untuk mengupayakan proses membangun rasa saling percaya di Semenanjung Korea didasarkan pada dasar keamanan yang kuat. Didukung oleh pencegahan yang kuat, pemerintah Korea Selatan akan merespon tegas terhadap segala tindakan provokasi oleh Korea Utara dan akan memastikan bahwa tindakan provokasi maupun tindakan perang akan berbuntut pada konsekuensi yang harus diterima. *Kedua*, membangun rasa percaya perlu dimulai dengan menjaga suatu perjanjian. Kepatuhan terhadap perjanjian antar-Korea yang ada serta untuk mereka yang dicapai

dengan masyarakat internasional sangat penting untuk mengumpulkan kepercayaan. *Ketiga*, melalui dialog dan kerjasama berdasarkan kepercayaan pemerintah Korea Selatan akan berupaya untuk mendorong Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya dan mematuhi norma-norma dan kewajiban internasional. *Keempat*, untuk memperkuat konsensus domestik, Korea Selatan akan mengumpulkan pendapat dari warga Korea Selatan dan meningkatkan transparansi dalam berbagi informasi dan implementasi kebijakan¹⁴. Hal ini juga akan melibatkan peran masyarakat internasional dengan tujuan untuk membuat kebijakan menjadi lebih efektif dan lebih dapat diterima untuk Utara.

Arah kebijakan ini mengarah pada keputusan yang nantinya akan diambil oleh Korea Selatan. Dengan arah kebijakan ini, Korea Selatan akan lebih tegas dalam memberikan respon terhadap segala tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara. *Trust Building Process* disepakati dengan adanya inisiatif kebijakan tersebut. Inisiatif kebijakan ini juga memiliki beberapa point. Inisiatif kebijakan ini berisi untuk Unifikasi damai dan Inisiatif Perdamaian dan Kerjasama di Asia Timur, Infrastruktur penguatan untuk unifikasi, perdamaian Berkelanjutan di semenanjung Korea, membangun kepercayaan untuk hubungan antar-Korea yang normal.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*

Kebijakan pada masa Presiden Park ini pada intinya memiliki tujuan untuk membantu Korea Utara untuk maju dan meninggalkan perogram nuklirnya yang membawa ancaman bagi negara lain. Dalam hal ini terlihat keseimbangan kerjasama dan kebijakan tegas akan provokasi yang nantinya mungkin akan terjadi di semenanjung Korea.

Meskipun *Trust Building Process* menjadi harapan yang besar bagi semenanjung Korea, namun pada akhirnya kebijakan ini harus berakhir karena dengan adanya provokasi oleh Korea Utara pada Januari 2016 telah melanggar adanya perjanjian kebijakan *trust building-process*.

Uji coba oleh Korea Utara kembali dilakukan pada Februari 2016. Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh yang merupakan pengujian terhadap teknologi rudal yang dilarang. Roket tersebut diluncurkan dari markas di barat laut negara tersebut hingga melewati bagian selatan pulau okinawa, Jepang. Sebelumnya Korea Utara sudah melakukan beberapa kali uji roket, yang mereka klaim sebagai tindakan yang memiliki tujuan ilmiah. Tidak hanya tahun 2016, beberapa tindakan uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara sebelumnya selalu disamarkan sebagai sebuah satelit. Adanya rincian uji coba tersebut tidak banyak diketahui oleh negara luar, hal ini dikarenakan Korea Utara merupakan negara dengan menganut rezim yang tertutup dan mengisolasi diri dari negara luar.

Sebulan sebelum penutupan Kaesong, Korea Utara mengklaim telah sukses melakukan tes bom hidrogen pada Januari 2016. Yang mana tes bom hidrogen ini menyebabkan gunung Paekdu meletus. Uji coba tersebut setara dengan gempa berkekuatan 5,1 SR. Hal ini tentu saja mengancam keamanan Korea Selatan sebagai negara tetangga Korea Utara.

Dengan hal ini, Korea Utara telah merusak kepercayaan yang ada di Semenanjung Korea dengan memperlihatkan fakta bahwa Korea Utara masih menjalankan dan mengembangkan program nuklirnya, dan juga Korea Utara dalam sikap provokasinya tersebut sudah mengancam keamanan domestik Korea Selatan. Pelanggaran Korea Utara ini memang bukan untuk permakalinya dilakukan dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Korea Selatan kemudian memberikan konsekuensi kebijakan yang tegas untuk Korea Utara.

Dalam kebijakan tercatat akan adanya konsekuensi tegas yang akan diberikan apabila terjadi ancaman nuklir dan tindakan provokasi. Langkah kebijakan yang dilakukan oleh Korea Selatan ini dengan mengumumkan bahwa Korea Selatan melakukan tindakan tegas untuk menutup Industri Kaesong yang selama lebih dari dua dekade menjadi simbol kerjasama damai di Semenanjung Korea. Sesuai arah kebijakannya, Korea Selatan berupaya untuk melakukan tindakan yang akan membuat program nuklir Korea Utara akan berhenti. Selain itu, penutupan Kaesong ini merupakan akhir dari

kerjasama di Semenanjung Korea. Adanya pelanggaran dalam upaya membangun rasa saling percaya yang sebelumnya disetujui oleh kedua negara di Semenanjung Korea, membawa kembali ketegangan hubungan kedua Korea. Provokasi yang selalu dilakukan oleh Korea Utara menjadi faktor berakhirnya kebijakan serta kerjasama yang ada, dan menjadi faktor untuk Korea Selatan dalam memberlakukan kebijakan penutupan Kawasan Industri Kaesong.

Dengan adanya provokasi ini perdamaian di semenanjung Korea hanya menjadi impian belaka. Kaesong yang diharapkan sebagai wadah penghubung kedua negara ini tidak lagi dipertahankan. Sanksi Korea Selatan ini juga merupakan upaya untuk melemahkan program Nuklir Korea Utara. Dengan pemutusan kerjasama tersebut, ketegangan kembali terjadi dalam hubungan di Semenanjung Korea.